



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
JL. PANGLIMA BATUR BANJARBARU NO.3
TELPON 0511-4773615

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB, Pengendalian dan Pengembangan serta Sekretariat.

Adapun mekanisme penyusunan Renja dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra, Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kesesuaian dengan Renja SKPD Pemko dengan Renja SKPD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Tahunan Daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan Tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi dan arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPRD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Fokus Prioritas
- 4.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 5.1. Program dan Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terbagi dalam 6 (enam) Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 535.017.100 dan terealisasi sebesar Rp. 392.559.200 atau sebesar 73,37%.
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.506.978.300 dan terealisasi sebesar Rp. 1.088.565.951 atau sebesar 72,23%.
- c. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 527.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 502.119.600 atau sebesar 95,16%.
- d. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.952.112.500 dan terealisasi sebesar Rp. 1.870.487.000 atau sebesar 95,81%.
- e. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 551.170.000 dan terealisasi sebesar Rp. 481.463.500 atau sebesar 87,35%.
- f. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 459.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 422.481.300 atau sebesar 91,96%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Adapun realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2023
Eselon III

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat						
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		BB	BB	BB	100
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah		WTP	WTP	WTP	100
3	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persentase	100%	100%	100%	100
Bidang Pajak & Retribusi Daerah						
1.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rupiah	93.895.586.175	102.895.586.175	120.250.159.521	116,86
2.	Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	12.877.857.810	12.988.471.875	14.307.343.673	110,15
3.	Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	NPWPD	50	50	63 NPWPD	126
Bidang PBB & BPHTB						
1	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	Rupiah	19.522.559.825	18.022.559.825	20.649.932.312	114,57
2	Meningkatkan Penerimaan BPHTB	Rupiah	47.000.000.000	49.500.000.000	52.717.527.693	106,50
3	Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Rupiah	4.000.000.000	4.000.000.000	14.516.716.105	362,91
Bidang Pengendalian Pengawasan						
1	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100
2	Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100
3	Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100

Tabel II.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2023

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2023
Eselon IV

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Sub Bagian Perencanaan Keuangan						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun dengan ketentuan	Dokumen	5	5	5	100
2	Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	Dokumen	1	1	1	100
3	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	12	12	12	100
4	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	51	52	52	100
5	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	4	4	100
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
1	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	100
2	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	6	6	6	100
3	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	-	2	2	100
4	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	Dokumen	1	1	1	100
5	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	50	50	50	100
6	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	1	1	100
7	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	3	3	100
8	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	33	33	33	100

9	Jumlah unit sarana dan prasana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	3	3	100
10	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	100
11	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	100
12	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	1	100
13	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	Unit	38	32	32	100
14	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	51	51	51	100
15	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	-	1	1	100
16	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	49	49	100
17	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	5	8	8	100
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah						
1	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	Dokumen	12	4	4	100
Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah						
1	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	Dokumen	9	4	4	100
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB-P2						
1	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	Laporan	12	12	12	100

	Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB-P2					
1	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	32	28	28	100
	Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian					
1	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan paik daerah	Dokumen	4	4	4	100
	Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan					
1	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan paik daerah	Laporan	4	4	4	100

Tabel II.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Esselon IV Tahun 2023

Evaluasi RENJA 2023 dan 2024

1. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. BPPRD

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bidang PBB & BPHTB					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	Rp. 19.522.559.825,-	3.459.090.800	Rp.20.649.932.312	2.959.052.951
		Meningkatkan Penerimaan BPHTB	Rp. 47.000.000.000,-		Rp.52.717.527.693	
		Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Rp.4.000.000.000,-		Rp. 14.516.716.105	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	28 dokumen	1.952.112.500,-	28 dokumen	1.870.487.000
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	12 laporan	1.506.978.300,-	12 laporan	1.088.565.951
2	Bidang PRD					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rp.93.895.586.175,-	1.078.810.000,-	120.250.159.521	983.583.100,-
		Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.12.877.857.810,-		14.307.343.673	
		Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	50 NPWPD		63 NPWPD	
	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	551.170.000,-	4 Dokumen	481.463.500
	Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	527.640.000,-	4 Dokumen	502.119.600
3	Bidang DALBANG					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	100%	994.417.100	100%	815.040.500
		Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan	100%		100%	

		Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah				
		Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	100%		100%	
	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 dokumen	459.400.000	4 dokumen	422.481.300
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 laporan	535.017.100	4 laporan	392.559.200
4	Sekretariat					
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	106.750.000	100%	99.936.250
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.0000	5 Dokumen	24.871.750
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	81.750.000	12 Laporan	75.064.500
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.906.447.600	100%	13.662.032.631
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	13.886.967.100	52 Orang/Bulan	13.642.646.206
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	19.480.500	4 Laporan	19.386.425
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	28.250.000	100%	23.828.892
	Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	28.250.000	5 Laporan	23.828.892

	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	1.235.786.850	100%	1.178.987.956
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	77.000.000	2 Paket	76.445.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	389.716.750	7 Paket	380.045.950
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.852.600	2 Paket	45.300.650
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.028.500	1 Dokumen	2.700.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	718.189.000	50 Laporan	674.495.556
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	1.415.075.000	100%	1.384.653.000
	Sub Keg : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	486.306.000	1 unit	468.700.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	560.000.0000	3 unit	553.753.000
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	33 unit	324.530.000	33 unit	319.900.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	44.239.000	5 unit	42.300.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Internal	100%	281.779.880	100%	154.125.716
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	25.789.784

	dan Listrik	Listrik yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	251.779.880	12 Laporan	128.335.932
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	621.504.000	100%	598.640.927
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.984.000	1 Unit	50.145.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	293.550.000	32 unit	278.119.927
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	48.520.000	51 Unit	45.520.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	175.000.000	1 Unit	173.416.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	51.450.000	49 unit	51.440.000

b. UPT 1

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	117.204.500	50%	114.183.320
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	4 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	68.410.500	4 Paket	66.545.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.219.000	1 Paket	5.194.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	1.440.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.090.000	-	21.003.320
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.530.000	100%	8.850.000
	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.530.000	3 Unit	8.850.000
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.400.000	100%	45.849.367
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	12 Laporan	27.249.367
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	46.150.000	100%	43.550.082

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	36.830.000	5 Unit	36.015.082
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.880.000	12 Unit	5.355.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.440.000	5 Unit	2.180.000

c. UPT 2

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	116.588.000	50%	114.328.920
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	4 Paket	19.372.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	67.793.000	4 Paket	67.248.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.220.000	1 Paket	5.220.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	1.485.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.090.000	2 Laporan	21.003.320
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.660.000	100%	28.210.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3 Unit	10.500.000	3 Unit	10.300.000
	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.160.000	3 Unit	17.910.0000

3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.600.000	100%	42.947.708
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	24.347.708
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.207.000	100%	42.326.257
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	41.157.000	6 Unit	39.276.257
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000	5 Unit	3.050.000

2. Realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Triwulan II (bulan Juni) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. BPPRD

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi sampai dengan Juni 2024	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bidang PBB & BPHTB					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	20.522.559.825	3.116.255.900	9.354.481.769	965.431.641
		Meningkatkan Penerimaan BPHTB	52.500.000.000		24.919.986.836	
		Menurunnya Tunggakan PBB-P2	7.000.000.000		Rp.2.732.232.786	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	24 dokumen	1.760.529.300,-	20 dokumen	588.161.425
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 &	12 laporan	1.355.726.600,-	6 laporan	377.270.216

		BPHTB)				
2	Bidang PRD					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rp.93.895.586.175,-	2.005.539.000,-	63.982.951.523	563.921.216
		Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.12.877.857.810,-		6.428.879.328	
		Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	50 NPWPD		20 NPWPD	
	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	644.995.000,-	2 Dokumen	186.651.000
	Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	1.360.544.000,-	2 Dokumen	37.270.216
3	Bidang DALBANG					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	100%	1.202.440.400	100%	320.501.000
		Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	100%		100%	
		Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	100%		100%	
	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	5 dokumen	498.727.000	2 dokumen	129.930.000
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 laporan	703.713.400	4 laporan	190.571.000
4	Sekretariat					
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	277.110.000	100%	134.174.900
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.500.000	3 Dokumen	10.107.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12 Laporan	249.610.000	6 Laporan	124.067.600

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.418.152.100	100%	7.160.544.722
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	14.398.152.100	52 Orang/Bulan	7.152.507.422
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	8.037.300
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	13.250.000	100%	-
	Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	13.250.000	2 Laporan	-
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	786.340.850	50%	334.265.820
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	40.540.000	1 Paket	14.457.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	301.587.900	3 paket	85.856.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.364.450	1 paket	21.958.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.028.500	1 dokumen	880.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	382.820.000	20 laporan	211.113.720
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	220.628.100	100%	29.000.00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	220.628.100	1 unit	29.000.00
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Internal	100%	234.772.550	100%	65.193.278
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	6 Laporan	12.958.778
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204.772.550	6 Laporan	52.234.500
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	1.393.157.150	100%	774.901.396
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.905.800	1 Unit	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	303.131.350	32 unit	106.118.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit		51 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.004.720.000	1 Unit	645.182.896
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	38.400.000	15 unit	11.600.000

b. UPT 1

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2024 (sampai juni)	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	103.145.500	50%	38.650.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	24.015.000	3 Paket	15.241.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	58.410.500	2 Paket	19.683.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.830.000	1 Paket	3.125.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	-	-
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	131.400.000	100%	24.948.666
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.800.000	3 Laporan	15.948.666
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.600.000	6 Laporan	9.000.000
3	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	42.488.900	100%	13.037.375
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	32.488.900	5 Unit	12.037.375
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.000.000	-	-

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.000.000	2 Unit	1.000.000
--	--	--	--------	-----------	--------	-----------

c. UPT 2

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2024 (sampai juni)	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85.810.500	50%	32.436.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	11.966.00	2 Paket	6.896.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	54.734.500	4 Paket	22.930.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.220.000	1 Paket	2.610.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	2 Laporan	-
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89.974.300	10%	2.680.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	82.275.300	-	-
	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.699.000	1 Unit	2.680.000
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.200.000	50%	20.505.86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000	6 Laporan	11.505.886
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	21.600.000	12 Laporan	9.000.000

	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.955.200	50%	15.002.35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	31.155.200	6 Unit	12.602.315
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.800.000	5 Unit	2.400.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hasil analisis Pencapaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru disajikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2024 (Sampai dengan triwulan II)
Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp. 177.918.146.000	Rp. 105.263.442.261
Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp. 13.327.605.705,-	Rp.6.428.879.328,66,-
Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%	-
Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%	-

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih dari 100%, tercapainya target kinerja disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Melakukan jemput bola/penagihan pajak langsung kepada wajib pajak;
2. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi;
3. Memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan patuh;
4. Pendataan kelapangan atas objek pajak yang lebih intensif;
5. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.

Melihat dari hasil realisasi indikator kinerja utama (IKU) untuk tahun 2023 yang berhasil diraih, maka untuk target perubahan tahun 2024 terjadi kenaikan yaitu menjadi Rp. 177.918.146.000,- dan target retribusi mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp. 7.500.000.000,-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Beberapa faktor yaitu :

2. Faktor Penghambat

- Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah;
- Kurang optimalnya pengawasan;
- Belum optimalnya pelayanan berbasis teknologi;
- Belum optimalnya dukungan dari mitra kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengirim ASN dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi untuk mengikuti bimtek dan diklat;
2. Penyediaan anggaran yang memadai guna memaksimalkan upaya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja;
4. Melakukan pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi yang memudahkan pelayanan berbasis teknologi.

3. Faktor Pendorong

1. Jumlah wajib pajak semakin bertambah;
2. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif dan progresif;
3. Kemajuan ilmu dan teknologi;
4. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dan jumlah petugas pajak yang memadai;
5. Potensi pajak yang cukup besar;
6. Disusunnya regulasi peraturan paja;
7. Ditunjukkanya Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas akan berdampak pada pencapaian visi misi Walikota yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten dengan sasaran meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya didukung dengan potensi yang sangat besar sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari proses pendataan dan pendaftaran hingga proses penagihan.

Dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, BPPRD perlu melakukan Langkah-langkah seperti :

- a. Meningkatkan pendataan dilapangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja;
- e. Meningkatkan pengembangan pelayanan berbasis teknologi.

Dengan demikian dalam proses pencapaian peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pajak dan retribusi daerah perlu di dukung dengan jumlah SDM yang banyak serta kompeten dan juga di dukung dengan ketersediaan anggaran operasional serta sarana dan prasarana dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)”

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjabaran rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD pada dasarnya tidak mengalami perubahan.

Pada Renja SKPD Tahun 2024 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru. Program dan Kegiatan Renja SKPD sesuai Renstra Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memuat 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak banyak berubah, akan tetapi jenis kegiatan dan target rencana capaian kinerja (besaran/volume) yang sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yaitu pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dikarenakan aspirasi/usulan yang muncul berasal dari usulan SKPD terkait langsung dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga. Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan (share) masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masing sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta kemampuan pendanaan yang akan tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya. Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2024 rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Banjarbaru akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil serta pariwisata dan ekonomi kreatif, mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun ekonomi kreatif, menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

Perekonomian Kota Banjarbaru mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang positif, mencapai 7.93% pada tahun 2022 dibandingkan 3.32% pada tahun 2021, kemudian, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 6.81%. meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya, pertumbuhan ini tetap

merupakan yang tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan dan melampaui pertumbuhan nasional dan Provinsi Kalsel yang mencapai 5,05 dan 4,84.

Gambaran perkembangan ekonomi makro di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

- **Tingkat Inflasi**, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan perhitungan yang diharapkan, akan tetapi angka yang diperoleh masih dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi Kota Banjarbaru mengacu pada tingkat inflasi di Kota Banjarmasin (diukur Bank Indonesia tiap tahunnya) yang selama ini menjadi acuan bagi perhitungan inflasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022, inflasi di Kota Banjarbaru mencapai angka 6,98% sedangkan angka inflasi Kota Banjarbaru pada tahun 2023 turun mencapai 2,28% yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gencarnya pemerintah melakukan upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tindakan pengendalian inflasi yang dilakukan secara rutin meliputi rapat koordinasi dan program lapangan seperti pasar murah, kampanye penanaman komoditas yang menyumbang inflasi, peningkatan produksi, dan Turdes Pengendalian Inflasi ke daerah oleh Kepala Daerah. Selain itu, TPID juga telah mengambil beberapa tindakan strategis untuk mengendalikan inflasi di daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dengan mendorong kerjasama antar daerah.

- **Pendapatan Perkapita**, Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 pendapatan per kapita Kota Banjarbaru tercapai sebesar Rp. 25,69 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yang tercapai sebesar Rp. 24,43 juta. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan perekonomian Kota Banjarbaru meningkat dibandingkan tahun 2021.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang cukup tinggi mencapai 7,93%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mengalami sedikit perlambatan namun masih tumbuh pesat hingga mencapai 6,81%, menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya serta perubahan yang di sebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer sedangkan perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya penyesuaian target dan penganggaran untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kota Banjarbaru. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2024.
3. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
4. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

URAIAN	TARGET 2024	PERUBAHAN 2024	+/-
Pendapatan Asli Daerah	329.362.089.000	340.549.164.263	11.187.075.263
Pajak Daerah	177.918.146.000	187.918.146.000	10.000.000.000
Retribusi Daerah	13.327.605.750	11.986.265.000	(1.341.340.750)
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.600.000.000	10.513.447.590	913.447.590
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	128.516.337.250	130.131.305.637	1.614.968.423

Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN. Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan. Arah kebijakan belanja daerah Kota Banjarbaru pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut : 1. Penyesuaian target untuk mencapai pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang berkembang. 2. Penyesuaian belanja rutin (gaji/tunjangan dan operasional) untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan kedalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program SKPD yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

Adapun metodologi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria-kriteria antara lain:

1. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas program pembangunan.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkembang.
4. Realistis untuk dilaksanakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 dasar yang diacu adalah RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diemban oleh BPPRD sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah

4.2 Prioritas dan Fokus Prioritas

Pembangunan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ada 4 (empat) prioritas pembangunan. Setiap tahun perencanaan diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi permasalahan yang ada setiap tahunnya. Adapun prioritas Pembangunan yang dilakukan oleh BPPRD pada tahun 2024 adalah :

Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan 2024
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Peningkatan potensi PAD dan investasi

4.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Banjarbaru untuk tahun 2021-2026 maka tujuan dan Sasaran Kerja SKPD masih disesuaikan dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menetapkan sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Untuk mewujudkan tujuan, perlu menetapkan sasaran

pokok yang akan dituju yaitu : **“Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”**.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai pada perubahan tahun 2024 adalah seperti pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2024
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp.187.918.146.000,-
			Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp.11.986.265.000,-
			Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%
			Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2024 adalah **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :**

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- c. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun kegiatan yang berubah pagu anggarannya ada 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.1.355.726.600 menjadi Rp.2.134.835.400 perubahan itu terjadi untuk penambahan pembelian belanja modal peralatan jaringan, belanja konsultasi berorientasi layanan berupa kerjasama dengan BPN untuk penilaian zona nilai tanah, belanja bahan cetakan berupa cetak blangko pendaftaran PBB & BPHTB dan belanja modal asset tidak berwujud/software berupa aplikasi E-BPHTB. Perubahan ini dilakukan guna mendukung tercapainya target PBB & BPHTB serta mendukung perbaikan server khususnya server PBB & BPHTB dan BPPRD memperoleh data zona nilai tanah di wilayah kota Banjarbaru
- b. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.1.360.544.000 menjadi Rp.611.713.600, terjadi penurunan pada anggaran dikarenakan pengurangan biaya sewa *Tapping Box* (alat pencatat pajak) yang biayanya telah didukung oleh Bank Kalsel, disamping itu ada penambahan untuk belanja jasa tenaga informasi dan teknologi

berupa pembuatan sistem aplikasi pendataan objek pajak daerah. Perubahan ini dilakukan guna membantu tercapainya capaian kinerja bidang Pajak dan Retribusi dalam melakukan penetapan dan penagihan pajak daerah.

- c. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.1.760.529.300 menjadi Rp. 2.118.406.800 penambahan tersebut diperlukan guna untuk belanja makan minum aktifitas lapangan untuk mensupport kegiatan cetak SPPT serta kegiatan penagihan PBB ke lapangan, belanja jasa tenaga ahli berupa petugas penyampaian SPPT ke Masyarakat. Perubahan ini dilakukan guna mendukung tercapainya target kinerja penagihan akan target PBB dan BPHTB.
- d. Penagihan Pajak Daerah, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 644.995.000 menjadi Rp. 693.854.500 perubahan itu terjadi untuk penambahan pembelian belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /perlengkapan dinas berupa pakaian dinas lapangan, dan belanja modal alat ukur universal berupa pembelian alat pengukur meter air. Perubahan ini dilakukan guna mendukung tercapainya target kinerja penagihan akan target Pajak Daerah (non PBB & BPHTB)

Dan 1 (satu) program penunjang

Ada pun seub kegitan yang anggarannya berubah pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota :

A. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 27.500.000 menjadi Rp. 35.517.000 perubahan terjadi untuk penambahan biaya perjalanan dinas biasa berupa perjalanan dinas kasubag perencanaan dan keuangan untuk Bimtek Renstra bertujuan untuk tercapainya dokumen Renstra baru di Tahun 2026.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 249.610.000 menjadi Rp. 256.910.000 perubahan terjadi untuk penambahan kekurangan belanja honorarium penanggung jawaban pejabat pengelola keuangan SKPD
- 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.14.398.152.100 menjadi Rp.15.251.489.585 penambahan tersebut diperlukan guna untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- 3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.382.820.000 menjadi Rp. 682.612.000 penambahan tersebut diperlukan guna untuk biaya perjalanan dinas biasa. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja BPPRD.
- 4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.0 menjadi Rp. 1.164.000.000 penambahan terjadi untuk pembelian belanja modal kendaraan bermotor berupa mobil operasional lapangan. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung petugas pajak BPPRD dalam melakukan pendataan dan penagihan pajak langsung ke lapangan.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.0 menjadi Rp. 150.278.100

penambahan untuk belanja modal peralatan studio/audio berupa pembelian sound system, belanja modal personal komputer berupa pembelian PC untuk pelayanan di bidang PBB dan PRD, dan pembelian printer

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 220.628.100 menjadi Rp.471.909.380 penambahan tersebut untuk belanja modal alat kantor lainnya berupa alat penghancur kertas kecil, belanja modal mabel berupa meja lipat dan sofa untuk pelayanan, belanja modal alat pendingin, belanja modal alat rumah tangga lainnya berupa dispenser & gorden. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung untuk tercapainya kinerja BPPRD dalam pelayanan kepada wajib pajak.

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.0 menjadi Rp. 31.750.000 penambahan untuk belanja pemeliharaan komputer/personal komputer, serta pemeliharaan jaringan listrik kantor.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.1.004.720.000 menjadi Rp. 1.314.070.000 penambahan tersebut diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor UPT wilayah 1

B. Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah Wilayah 2 (UPTPD 2)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Barang Logistik Kantor, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 54.734.500 menjadi Rp. 59.354.500 penambahan tersebut diperlukan guna untuk belanja makan

minum aktifitas lapangan untuk mensupport kegiatan pendataan PBB ke lapangan

- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebesar Rp. 12.090.000 menjadi Rp. 21.540.000 penambahan tersebut diperlukan guna untuk biaya perjalanan dinas dalam kota untuk petugas lapangan

2. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.699.000 menjadi Rp. 39.118.000 penambahan tersebut diperuntukkan belanja modal alat kantor lainnya berupa papan nama ruangan dan papan strukrut organisasi, belanja modal *home use* berupa gorden untuk ruangan pelayanan

4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.31.155.200 menjadi Rp. 41.153.850 penambahan tersebut diperlukan untuk belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan serta pembelian suku cadang mobil pelayanan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, , dengan total pagu awal pada Tahun 2024 sebesar Rp.0 menjadi Rp. 69.944.800 penambahan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor (pengecetan) UPT wilayah II

Adapun perumusan program dan kegiatan Perubahan Tahun 2024 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Banjarbaru

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Banjarbaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2024										Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan (a/b/c)	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	32 Unit	32 Unit	303.131.350	303.131.350	-	PAD	PAD	32 Unit	275.150.000	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	-	66 Unit	-	31.750.000	31.750.000	PAD	PAD	66 Unit	-	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Unit	2 Unit	1.004.720.000	1.314.070.000	309.350.000	PAD	PAD	2 Unit	-	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	49 Unit	84 Unit	38.400.000	38.400.000	-	PAD	PAD	84 Unit	39.450.000	
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN																					
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	177,9 M	187,9 M	1.202.440.400	1.202.440.400	-	PAD	PAD	100%	1.180.000.000	
					- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	13,3 M					11,9 M									
					- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	100%					100%									
					-Rasio PAD	-Rasio PAD	100%					100%									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	- Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	1.202.440.400	1.202.440.400	-	PAD	PAD	100%	1.180.000.000	
					- Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	- Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	100%					100%									
					- Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	- Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	100%					100%									
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	8 Laporan	8 Laporan	703.713.400	703.713.400	-	PAD	PAD	8 Laporan	694.500.000	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Dokumen	5 Dokumen	498.727.000	498.727.000	-	PAD	PAD	5 Dokumen	485.500.000	
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																					
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	177,9 M	187,9 M	2.005.539.000	1.305.568.100	(699.970.900)			100%	1.872.000.000	
					- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	13,3 M					11,9 M									
					- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	100%					100%									
					- Rasio PAD	- Rasio PAD	100%					100%									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	104,8 M	113,1 M	2.005.539.000	1.305.568.100	(699.970.900)			100%	1.872.000.000	
					- Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	- Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	13,3 M					11,9 M									
					- Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	- Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	50 npwpd					50 npwpd									
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	4 Dokumen	4 Dokumen	1.360.544.000	611.713.600	(748.830.400)			4 Dokumen	1.360.000.000	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	4 Dokumen	4 Dokumen	644.995.000	693.854.500	48.859.500			4 Dokumen	512.000.000	
BIDANG PBB DAN BPHTB																					
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	177,9 M	187,9 M	3.116.255.900	4.253.242.200	1.136.986.300	PAD	PAD	100%	3.092.650.000	
					- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	13,3 M					11,9 M									
					- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	- Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	100%					100%									
					- Rasio PAD	- Rasio PAD	100%					100%									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	- Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	20,5 M	20,7 M	3.116.255.900	4.253.242.200	1.136.986.300	PAD	PAD	100%	3.092.650.000	
					- Meningkatkan Penerimaan BPHTB	- Meningkatkan Penerimaan BPHTB	52,5 M					54 M									
					- Menurunnya Tunggakan PBB-P2	- Menurunnya Tunggakan PBB-P2	7 M					7 M									
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	1.355.726.600	2.134.835.400	779.108.800	PAD	PAD	12 Laporan	1.330.150.000	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPPRD	BPPRD	Banjarbaru	Banjarbaru	24 Dokumen	28 Dokumen	1.760.529.300	2.118.406.800	357.877.500	PAD	PAD	28 Dokumen	1.762.500.000	
					TOTAL PAGU BPPRD										23.462.017.950	27.180.667.315	3.718.649.365				24.917.043.034
UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I														277.034.400	277.034.400	-				259.540.000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Internal	Cakupan Layanan Internal yang difasilitasi	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	277.034.400	277.034.400	-	PAD	PAD	100%	259.540.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	103.145.500	103.145.500	-	PAD	PAD	100%	155.040.000	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Paket	4 Paket	24.015.000	24.015.000	-	PAD	PAD	4 Paket	22.040.000	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	6 Paket	6 Paket	58.410.500	58.410.500	-	PAD	PAD	6 Paket	65.000.000	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Paket	1 Paket	6.830.000	6.830.000	-	PAD	PAD	1 Paket	7.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024													Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan (a/b/c)			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capian Kinerja	Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	2.000.000	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	2 Laporan	2 Laporan	12.090.000	12.090.000	-	PAD	PAD	2 Laporan	59.000.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	131.400.000	131.400.000	-	PAD	PAD	100%	60.000.000	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	109.800.000	109.800.000	-	PAD	PAD	12 Laporan	39.500.000	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	21.600.000	21.600.000	-	PAD	PAD	12 Laporan	20.500.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	42.488.900	42.488.900	-	PAD	PAD	100%	44.500.000	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	6 Unit	6 Unit	32.488.900	32.488.900	-	PAD	PAD	6 Unit	33.500.000	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Unit	12 Unit	7.000.000	7.000.000	-	PAD	PAD	12 Unit	7.500.000	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UPTD 1	UPTD 1	Banjarbaru	Banjarbaru	6Unit	6 Unit	3.000.000	3.000.000	-	PAD	PAD	6 Unit	3.500.000	
UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II														258.940.000	379.888.250	120.948.250			299.400.000		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Internal	Cakupan Layanan internal yang difasilitasi	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	258.940.000	379.888.250	120.948.250	PAD	PAD	100%	299.400.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	85.810.500	98.080.500	12.270.000	PAD	PAD	100%	101.700.000	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Paket	3 Paket	11.966.000	11.966.000	-	PAD	PAD	5 Paket	15.600.000	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	6 Paket	6 Paket	54.734.500	59.354.500	4.620.000	PAD	PAD	6 Paket	56.450.000	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Paket	1 Paket	5.220.000	5.220.000	-	PAD	PAD	1 Paket	12.300.000	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	0%	1.800.000	-	(1.800.000)	PAD	PAD	1 Dokumen	2.050.000	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	2 Laporan	3 Laporan	12.090.000	21.540.000	9.450.000	PAD	PAD	2 Laporan	15.300.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	84.974.300	113.709.100	28.734.800	PAD	PAD	100%	98.000.000	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	10 Unit	6 Unit	82.275.300	74.591.100	(7.684.200)	PAD	PAD	10 Unit	90.000.000	
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Unit	14 Unit	2.699.000	39.118.000	36.419.000	PAD	PAD	1 Unit	8.000.000	
								UPTD 2	UPTD 2												
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	52.200.000	52.200.000	-	PAD	PAD	100%	52.800.000	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	30.600.000	30.600.000	-	PAD	PAD	12 Laporan	32.800.000	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	21.600.000	21.600.000	-	PAD	PAD	12 Laporan	20.000.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	100%	100%	35.955.200	115.898.650	79.943.450	PAD	PAD	100%	46.900.000	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	7 Unit	8 Unit	31.155.200	41.153.850	9.998.650	PAD	PAD	7 Unit	46.900.000	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	-	1 Unit	-	69.944.800	69.944.800	PAD	PAD	-	-	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UPTD 2	UPTD 2	Banjarbaru	Banjarbaru	5 Unit	5 Unit	4.800.000	4.800.000	-	PAD	PAD	5 Unit	-	
TOTAL PAGU BPPRD , UPT I & UPT II														23.997.992.350	27.837.589.965	3.839.597.615				25.475.983.034	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan output rencana kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan tersusunnya penjelasan umum Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah mempunyai pedoman kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 diharapkan dapat terimplementasi langsung kepada masyarakat dan atau lingkungan Kota Banjarbaru.

Masukan yang berarti dan bermanfaat, sangat kami perlukan untuk langkah kedepan dalam membangun Kota Banjarbaru menuju Kota Berkarakter.

Banjarbaru, September 2024

Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740528 199503 1 003